

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke

Everistus Ricardus¹, Robertus Pecamuya², Yulianus Tuakra³, Martinus Wika⁴

Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro, Merauke, Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespondensi: everistusrikardus9@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 15-06-2025

Disetujui 16-06-2025

Diterbitkan 19-06-2025

Katakunci:

*Peningkatan Kapasitas;
Aparatur Kampung;
Pengelolaan Dana Desa;
Pembangunan
Berkelanjutan;
Partisipasi Masyarakat*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Merauke dalam pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap: sosialisasi program, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi aparatur kampung dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan dana desa sesuai regulasi, penyusunan laporan keuangan, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan dan keterampilan aparatur kampung dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), serta laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam musyawarah kampung. Kegiatan ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang ekonomi lokal, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan. Meskipun dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan akses transportasi, upaya solutif dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Diperlukan pendampingan lanjutan dan sinergi dengan pemerintah daerah agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rikardus, E., Pecamuya, R. ., Tuakra, Y., & Wika, M. . (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 340-352. <https://doi.org/10.63822/7ntme365>

PENDAHULUAN

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sebagai kawasan perbatasan, Merauke memiliki arti penting dalam konteks ketahanan nasional, baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Tambaip, Tjilen, & Ohoiwutun, 2023b). Pembangunan wilayah ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan perdesaan, kebijakan dana desa hadir sebagai instrumen fiskal yang dirancang untuk mendukung pembangunan kampung/desa secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan (Tambaip, Tjilen, & Ohoiwutun, 2023a). Alokasi dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun memberikan peluang besar bagi kampung-kampung di Merauke untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (Syahrudin, Jalal, et al., 2023).

Namun demikian, realisasi kebijakan ini di tingkat kampung belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai studi dan temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di Merauke masih menghadapi tantangan serius. Salah satu persoalan mendasar yang kerap dijumpai adalah rendahnya kapasitas aparatur kampung dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat (Tambaip, Tjilen, Moento, et al., 2023). Banyak rencana pembangunan kampung disusun tanpa melalui proses identifikasi masalah yang mendalam, tanpa data yang memadai, serta minim partisipasi dari kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat. Dalam aspek pengelolaan keuangan desa, aparatur kampung kerap mengalami kendala dalam menyusun anggaran, mengelola belanja, serta membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang berlaku (Syahrudin, Tambaip, et al., 2023). Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan penggunaan dana, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana.

Selain itu, rendahnya literasi aparatur kampung terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, turut menjadi faktor penghambat (Tjilen et al., 2024). Partisipasi masyarakat dalam siklus pembangunan kampung, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, masih terbatas dan seringkali bersifat formalitas (Tambaip et al., 2024). Padahal, partisipasi yang bermakna sangat penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akibat dari berbagai persoalan tersebut, dana desa yang seharusnya menjadi pendorong utama pembangunan kampung yang inklusif dan berkelanjutan belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan yang dilaksanakan cenderung berorientasi pada output fisik semata, tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, maupun aspek sosial budaya yang menjadi kekayaan lokal (Soesatyo, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan dana desa merupakan kebutuhan mendesak, terutama dalam konteks Merauke yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan budaya tersendiri. Intervensi pengabdian masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi menjadi sangat relevan sebagai upaya konkret untuk memperkuat tata kelola dana desa agar dapat mendukung pembangunan kampung yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan (Kamuli et al., 2023).

Peningkatan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Merauke merupakan langkah strategis yang mendesak dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dana desa agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Aparatur kampung memiliki peran sentral dalam mengelola dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban (Zacharias & Iskandar, 2025). Oleh karena itu, kualitas tata kelola dana desa sangat bergantung pada kemampuan dan integritas aparatur tersebut. Kegiatan pengabdian ini menjadi penting sebagai bentuk intervensi nyata dalam memberikan pelatihan dan pendampingan teknis agar aparatur kampung mampu menyusun rencana pembangunan kampung yang berbasis data, mengelola keuangan desa sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), serta menghasilkan laporan keuangan dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memperbaiki tata kelola internal pemerintahan kampung, penguatan kapasitas aparatur kampung juga memiliki urgensi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan kampung yang berkelanjutan tidak dapat terwujud tanpa keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari musyawarah perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan. Partisipasi masyarakat yang bermakna akan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi upaya sistematis dalam membangun tata kelola dana desa yang tidak hanya berorientasi pada output pembangunan fisik semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan program-program pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat kohesi sosial di tingkat kampung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur kampung di Kabupaten Merauke dalam pengelolaan dana desa, meningkatkan pemahaman mereka terkait prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memfasilitasi lahirnya dokumen perencanaan pembangunan kampung yang responsif dan berkualitas.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, dengan tujuan untuk memastikan tercapainya peningkatan kapasitas aparatur kampung yang aplikatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling efektif untuk memberdayakan aparatur kampung melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk mengidentifikasi permasalahan nyata dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Metode utama yang digunakan pada tahap awal adalah sosialisasi dan identifikasi kebutuhan. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi program kepada pemerintah kampung, aparat distrik, serta pemangku kepentingan lainnya, guna membangun pemahaman bersama, memperoleh dukungan, dan memastikan komitmen para pihak terhadap pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan pengabdian agar tercipta sinergi yang baik antara tim pelaksana dan pihak-pihak di lapangan.

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan melalui wawancara terstruktur dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion* atau *FGD*). Kegiatan ini melibatkan aparatur kampung, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi terkait

kelemahan, tantangan, dan peluang dalam pengelolaan dana desa di masing-masing kampung. Melalui proses ini, diperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aspek-aspek pengelolaan dana desa yang perlu diperkuat, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan. Hasil identifikasi kebutuhan ini kemudian menjadi dasar untuk merancang materi pelatihan dan bentuk pendampingan yang lebih tepat sasaran serta relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan pengabdian adalah pelatihan dan pemberian materi yang dirancang untuk memperkuat kompetensi aparatur kampung dalam mengelola dana desa secara efektif dan berkelanjutan. Pelatihan dilaksanakan secara klasikal melalui pertemuan tatap muka, namun dikombinasikan dengan metode berbasis studi kasus nyata yang relevan dengan permasalahan pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke. Materi utama yang disampaikan dalam pelatihan meliputi beberapa aspek penting, yakni: perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan untuk memastikan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya; pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi agar tercipta tata kelola keuangan desa yang baik dan bebas dari penyalahgunaan; teknik penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam hal administrasi dan pelaporan; serta strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung guna memperkuat peran serta warga dalam seluruh siklus pembangunan desa.

Pelatihan ini menggunakan kombinasi metode ceramah, diskusi, simulasi, dan kerja kelompok untuk mendorong interaksi aktif dan pemahaman yang lebih mendalam. Metode ceramah digunakan untuk penyampaian konsep dan regulasi, sedangkan diskusi dan simulasi diarahkan untuk membahas dan memecahkan persoalan nyata yang dihadapi peserta. Sementara itu, kerja kelompok dimaksudkan untuk melatih kemampuan kolaboratif aparatur kampung dalam menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan yang sesuai standar. Dengan model pelatihan seperti ini, diharapkan aparatur kampung tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis dalam tugas keseharian mereka.

Tahapan berikutnya adalah pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung di kampung-kampung peserta setelah pelaksanaan pelatihan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi dan keterampilan yang telah diperoleh dalam pelatihan dapat diterapkan secara nyata dalam praktik pemerintahan kampung sehari-hari. Tim pengabdian memberikan bimbingan intensif kepada aparatur kampung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) agar dokumen perencanaan dan penganggaran kampung lebih terstruktur, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendampingan juga difokuskan pada proses administrasi dan pelaporan keuangan, untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyiapkan dokumen administrasi dan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendampingan teknis ini juga mencakup fasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah kampung, yang bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan kampung, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan pendekatan ini, diharapkan aparatur kampung tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu menggerakkan masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan.

Sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan program, dilakukan pula tahap monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan hasil pelatihan dan pendampingan di lapangan. Monitoring

difokuskan pada pengamatan langsung dan pengumpulan data terkait sejauh mana aparatur kampung menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan dana desa dan tata kelola pemerintahan kampung. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat capaian kegiatan, hambatan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang diperlukan agar penguatan kapasitas aparatur kampung dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi masukan penting untuk perbaikan program dan sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola kampung yang lebih baik di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana melalui serangkaian tahapan mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan teknis di kampung-kampung sasaran di Kabupaten Merauke. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan dukungan aktif dari pemerintah kampung, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menggambarkan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola dana desa secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Aparatur Kampung melalui Pre-test dan Post-test

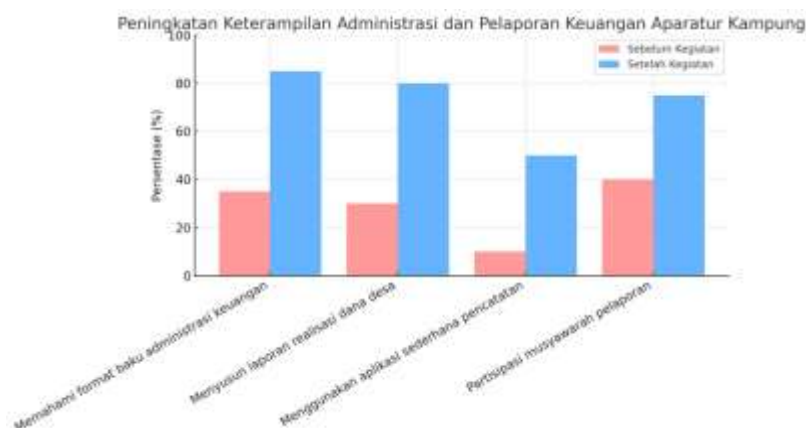
Aspek yang Diukur	Nilai Rata-rata Pre-test (Skala 0-100)	Nilai Rata-rata Post-test (Skala 0-100)	Peningkatan (%)
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Kampung	58	82	+41%
Pemahaman Penyusunan APBK	55	80	+45%
Pemahaman Pelaporan Dana Desa	52	78	+50%
Pemahaman Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	50	76	+52%

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman aparatur kampung di Kabupaten Merauke pada berbagai aspek utama setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Peningkatan paling signifikan tercatat pada aspek pemahaman prinsip pembangunan berkelanjutan (+52%) dan pelaporan dana desa (+50%). Hal ini menunjukkan efektivitas program pengabdian dalam memperkuat kapasitas tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Pengabdian Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Merauke

Aspek Kegiatan	Hasil Utama	Indikator Pencapaian
Peningkatan Pemahaman Aparatur	Pemahaman meningkat terkait prinsip pengelolaan dana desa, perencanaan, dan pelaporan.	Rata-rata nilai post-test meningkat 35% dibanding pre-test. 90% peserta aktif berdiskusi.
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusun draft RKP dan APBK yang partisipatif, sesuai regulasi, dan berbasis pembangunan berkelanjutan.	Dokumen RKP dan APBK memuat aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Disahkan melalui musyawarah kampung dengan partisipasi tokoh masyarakat dan perempuan.
Peningkatan Keterampilan Administrasi	Aparatur mampu menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa dengan format standar.	80% aparatur dapat menyusun laporan keuangan secara mandiri. Beberapa kampung mulai memakai aplikasi sederhana untuk administrasi keuangan.
Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan kampung.	Musyawarah kampung melibatkan kelompok adat, perempuan, dan pemuda secara aktif.

Tabel 2 memperlihatkan capaian utama kegiatan pengabdian yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Merauke dalam pengelolaan dana desa. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terkait prinsip tata kelola dana desa, yang tercermin dari peningkatan nilai post-test sebesar 35% dan partisipasi aktif selama pelatihan. Aparatur kampung juga berhasil menyusun dokumen RKP dan APBK yang lebih partisipatif, sesuai regulasi, serta memuat aspek pembangunan berkelanjutan, yang disahkan melalui musyawarah kampung dengan melibatkan tokoh adat, perempuan, dan pemuda. Selain itu, terjadi peningkatan kemampuan administrasi dan pelaporan keuangan secara mandiri, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan kampung.



Grafik 1. Peningkatan Keterampilan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Aparatur Kampung

Grafik 1 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada keterampilan administrasi dan pelaporan keuangan aparatur kampung di Kabupaten Merauke setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Persentase pemahaman format administrasi baku meningkat dari 35% menjadi 85%, kemampuan menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa naik dari 30% menjadi 80%, sementara penggunaan aplikasi sederhana untuk pencatatan keuangan bertambah dari 10% menjadi 50%. Selain itu, partisipasi dalam musyawarah pelaporan keuangan meningkat dari 40% menjadi 75%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelatihan dan pendampingan yang dilakukan berhasil memperkuat kapasitas tata kelola keuangan kampung secara nyata.

Tabel 3. Peningkatan Partisipasi dan Tata Kelola di Kampung Sasaran

Indikator Hasil	Kondisi Sebelum Kegiatan		Kondisi Setelah Kegiatan		Keterangan
Persentase masyarakat yang hadir dalam musyawarah kampung	< 30%		≥ 60%		Meningkat signifikan, termasuk partisipasi perempuan dan pemuda
Jumlah usulan program pembangunan yang berasal dari warga	Rata-rata usulan	2–3	Rata-rata usulan	7–8	Usulan mencakup ekonomi, sosial, lingkungan
Keterlibatan perempuan dalam forum musyawarah	< 10%		35%		Perempuan aktif menyampaikan aspirasi terkait pendidikan dan kesehatan
Keterlibatan kelompok pemuda dalam forum musyawarah	Hampir ada	tidak ada	25%		Pemuda berkontribusi pada gagasan inovasi ekonomi kreatif
Ketersediaan dokumen RKP yang disahkan musyawarah	Tidak ada / kurang lengkap	Tersusun dan disahkan		dan	Disusun berbasis partisipasi, mencakup pembangunan berkelanjutan
Penggunaan aplikasi sederhana untuk pencatatan keuangan	Tidak ada		Digunakan di 3 kampung		Aplikasi berbasis Excel untuk laporan keuangan dasar (hasil inovasi lokal)

Tabel 3 menunjukkan hasil pengabdian yang berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di kampung sasaran. Partisipasi warga dalam musyawarah kampung meningkat dari kurang dari 30% menjadi lebih dari 60%, dengan keterlibatan perempuan naik hingga 35% dan kelompok pemuda mencapai 25%. Jumlah usulan program yang berasal dari masyarakat juga bertambah signifikan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, dokumen RKP tersusun dengan lebih baik dan disahkan melalui musyawarah, serta telah mulai diterapkan aplikasi sederhana berbasis Excel untuk mendukung pencatatan keuangan secara transparan.

Tabel 4. Dukungan terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik di Kampung Binaan Kabupaten Merauke

Indikator Tata Kelola	Kondisi Sebelum Pengabdian (%)	Kondisi Sesudah Pengabdian (%)	Keterangan Perubahan
Aparatur memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas	45%	85%	Peningkatan signifikan pemahaman setelah pelatihan dan pendampingan
Penyusunan dokumen perencanaan (RKP/APBK) sesuai regulasi	40%	80%	Aparatur mampu menyusun dokumen lebih sesuai aturan dan partisipatif
Pelaporan penggunaan dana desa tepat waktu	50%	75%	Proses pelaporan keuangan lebih tertib dan sesuai format
Intensitas komunikasi dengan pihak distrik dan pendamping desa	35%	78%	Aparatur aktif konsultasi dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaporan
Partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung	30%	70%	Masyarakat lebih terlibat dalam perencanaan, terutama perempuan dan kelompok muda

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada berbagai indikator tata kelola pemerintahan kampung di Kabupaten Merauke. Pemahaman aparatur terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas meningkat dari 45% menjadi 85%, sejalan dengan kemampuan mereka dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran yang sesuai regulasi, yang naik dari 40% menjadi 80%. Pelaporan penggunaan dana desa menjadi lebih tertib dengan ketepatan waktu yang meningkat dari 50% menjadi 75%. Selain itu, intensitas komunikasi aparatur dengan pihak distrik dan pendamping desa meningkat dari 35% menjadi 78%, disertai peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung dari 30% menjadi 70%. Data ini memperkuat temuan bahwa kegiatan pengabdian berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke, yang merupakan wilayah perbatasan negara, menghadapi tantangan nyata dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kualitas perencanaan pembangunan kampung yang disusun oleh aparatur, sehingga program-program pembangunan kurang terarah dan sering tidak menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa, yang berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan kampung. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa juga masih terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan kampung dengan aspirasi warga (Setiadi et al., 2025).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui peningkatan kapasitas aparatur kampung secara sistematis dan partisipatif. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual terkait tata kelola dana desa, tetapi juga membekali aparatur dengan keterampilan teknis dalam menyusun dokumen perencanaan, mengelola keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai regulasi. Pendekatan partisipatif yang

diterapkan dalam kegiatan ini juga mendorong terwujudnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah kampung dan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi proses pembangunan (Laowo et al., 2024).

Urgensi kegiatan ini semakin tinggi mengingat posisi strategis Kabupaten Merauke sebagai wilayah perbatasan negara yang memiliki fungsi vital dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas nasional. Peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola dana desa tidak hanya berimplikasi pada kualitas pembangunan lokal, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan (Mayyora et al., 2025). Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan kampung dan mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kampung dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pre-test, sebagian besar aparatur kampung menunjukkan pemahaman yang terbatas terkait prinsip-prinsip dasar tata kelola dana desa, termasuk dalam aspek perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK), serta pelaporan keuangan. Banyak aparatur yang belum memahami alur penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP), dan masih mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan jenis belanja sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, keterampilan teknis dalam menggunakan format administrasi dan pelaporan keuangan kampung juga tergolong rendah sebelum pelatihan dilaksanakan.

Setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, hasil post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman aparatur kampung secara signifikan, terutama dalam aspek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan. Aparatur juga lebih mampu menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa dengan format yang sesuai ketentuan, serta menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menyusun pertanggungjawaban administrasi yang sistematis (Sugianto, 2025). Temuan dari observasi selama pendampingan memperkuat hasil tersebut; aparatur kampung mulai menunjukkan kemandirian dalam menyusun RKP dan APBK dengan lebih rapi, serta berani menginisiasi forum musyawarah kampung secara lebih inklusif. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi dalam praktik tata kelola pemerintahan kampung yang lebih profesional dan akuntabel.

Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan kampung di Kabupaten Merauke. Melalui pelatihan dan pendampingan intensif, aparatur kampung memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang selaras dengan regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dokumen RKP yang disusun aparatur kampung pasca-pendampingan menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam aspek perumusan prioritas kegiatan pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Demikian pula, dokumen APBK menjadi lebih terstruktur, dengan klasifikasi anggaran yang jelas dan akurat sesuai pos belanja yang telah ditetapkan pemerintah (Tumboimbela et al., 2025).

Dalam aspek pelaporan keuangan, aparatur kampung mampu menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa secara lebih sistematis dan transparan. Laporan tersebut memuat informasi yang lengkap, mulai dari uraian kegiatan, penggunaan anggaran, hingga dokumentasi pendukung yang relevan.

Peningkatan kualitas dokumen ini sangat penting karena menjadi dasar tata kelola pemerintahan kampung yang baik, transparan, dan akuntabel (Nasir, 2025). Selain sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi, dokumen perencanaan dan pelaporan yang baik juga berperan strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan kampung, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil pengabdian ini tidak hanya memperbaiki kualitas administratif, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola pembangunan kampung yang partisipatif dan berorientasi jangka panjang.

Kegiatan pengabdian ini turut mendorong peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan kampung, khususnya melalui penguatan forum musyawarah kampung sebagai wadah pengambilan keputusan bersama (Hulu, 2024). Selama pelaksanaan pendampingan, terlihat adanya peningkatan kehadiran dan keterlibatan aktif warga dalam forum-forum musyawarah, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat. Keterlibatan kelompok-kelompok ini menjadi capaian penting karena sebelumnya mereka cenderung hanya menjadi pendengar pasif atau tidak dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan (Prameswari & Setiawan, 2024). Melalui pendekatan partisipatif dan fasilitasi diskusi yang inklusif, masyarakat mulai berani menyampaikan pendapat, memberikan masukan terhadap program prioritas kampung, serta terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan partisipasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, di antaranya keberhasilan tim pengabdian dalam menciptakan suasana musyawarah yang terbuka dan egaliter, materi sosialisasi yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan kontekstual, serta contoh-contoh nyata keberhasilan partisipasi masyarakat dari kampung lain yang dijadikan bahan diskusi. Namun, terdapat pula hambatan yang dihadapi selama pendampingan, seperti masih adanya dominasi segelintir tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasan waktu masyarakat untuk mengikuti musyawarah karena kesibukan bekerja, dan kendala komunikasi antarwarga akibat jarak antarperkampungan yang cukup jauh. Meskipun demikian, kegiatan ini berhasil menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya partisipasi yang lebih kuat di tingkat kampung, sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Hombone, 2025).

Penguatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan dana desa melalui kegiatan ini secara langsung mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat kampung. Dalam bidang ekonomi lokal, perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran mendorong pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi produktif dan pengembangan usaha kecil berbasis potensi lokal. Sementara itu, peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah kampung memperkuat inklusi sosial dan mendorong kesetaraan dalam akses terhadap manfaat pembangunan (Yunas et al., 2024). Kegiatan ini juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan mendorong integrasi aspek keberlanjutan dalam setiap perencanaan, seperti pengelolaan sumber daya alam secara arif, konservasi lahan, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang semakin baik tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan kampung yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pelaksanaan pengabdian ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung kegiatan, seperti ketersediaan ruang pertemuan yang

memadai dan perlengkapan penunjang pelatihan di beberapa kampung. Perbedaan kemampuan awal aparatur kampung dalam memahami materi pelatihan juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan bertahap. Selain itu, akses transportasi antar kampung yang sulit, terutama pada musim hujan, menghambat kelancaran pelaksanaan pendampingan secara langsung dan berkelanjutan. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdian menerapkan beberapa langkah solutif, antara lain dengan memanfaatkan fasilitas seadanya secara kreatif, menyusun modul pelatihan yang sederhana dan mudah dipahami, serta memaksimalkan komunikasi daring untuk koordinasi dan monitoring apabila pertemuan tatap muka tidak memungkinkan. Upaya-upaya ini memastikan kegiatan tetap berjalan efektif meskipun dalam kondisi yang penuh keterbatasan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Merauke, khususnya dalam aspek perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa. Melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan fasilitasi musyawarah kampung, aparatur kampung menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan kampung, sehingga tata kelola pemerintahan kampung menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur kampung memiliki peran penting dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah strategis perbatasan seperti Merauke. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi pendampingan serupa, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dan mengintegrasikan hasil kegiatan ini ke dalam program pembangunan pemerintah agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Merauke atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada STISIPOL Yaleka Maro Merauke yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk dukungan akademik, kolaborasi, dan tenaga pendamping selama pelaksanaan kegiatan. Sinergi dari berbagai pihak ini menjadi kunci keberhasilan program dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Hombone, E. (2025). Smart Village sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 122–131.
- Hulu, F. (2024). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Desa Hilianaa. *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 33–49.

- Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, 3(2).
- Laowo, E. N., Hulu, F., Lahagu, P., & Mendrofa, S. A. (2024). Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. *Visi Sosial Humaniora*, 5(2), 232–252.
- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanusmawatie, I., & Wanto, A. H. (2025). Transformasi Digital Desa dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Literature Review. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 100–111.
- Nasir, M. (2025). Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(3), 468–478.
- Prameswari, H. L. K., & Setiawan, S. (2024). Peningkatan Kualitas Pelatihan Karawitan Pada Komunitas Teras Budaya Melalui Pendekatan Manajemen Partisipatif. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1), 54–68.
- Setiadi, A., Mulyaningsih, M., & Ulumudin, A. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Citengah Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 7(1), 58–79.
- Soesatyo, B. (2024). Strategi Empat Pilar Kebangsaan Bagi Pembangunan Generasi Muda Dalam Menyongsong Bonus Demografi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Kepulauan Riau. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 43–66.
- Sugianto, I. (2025). Implementasi Pendampingan Pelaporan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa Sukahening. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, 2(2), 1–6.
- Syahrudin, S., Jalal, N., Nahumury, M. A. I., Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(3), 576–586.
- Syahrudin, S., Tambaip, B., Tjilen, A. P., Riyanto, P., Jalal, N., Moento, P. A., Prasetya, M. N., & Enala, S. H. (2023). Membangun Karakter Positif dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Merauke. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 95–105.
- Tambaip, B., Riyanto, P., Tjilen, A. P., Negara, I. A., & Musamus, U. (2024). *Penguatan Sistem Manajemen SDM untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan di Lingkungan Desa*. 1(10), 1611–1619.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., Moento, P. A., & Riyanto, P. (2023). MENUJU DESA MANDIRI: MEWUJUDKAN POTENSI KAMPUNG MELALUI PEMBENTUKAN BUMK. *Nusantara Hasana Journal*, 2(12), 98–106.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023a). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 97–106.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023b). Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 5(1), 1–9.
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., Dharmawan, B., Adrianus, A., Riyanto, P., & Ohoiwutun, Y. (2024). Engaging stakeholders in policy decision-making for food security governance: Identification, perception, and contribution. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 8(1), 144–154.

<https://doi.org/10.22495/cgobrv8i1p12>

- Tumboimbela, M. J., Wokas, H., & Kapojos, P. (2025). Analisis pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 190–199.
- Yunas, N. S., Ramadlan, M. F. S., Damayanti, R., & Wahyudi, T. H. (2024). Penguatan Inklusi Sosial dalam Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Surya Abdimas*, 8(1), 93–105.
- Zacharias, T., & Iskandar, A. (2025). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH. *JURNAL BADATI*, 7(1), 27–43.